



BULETIN MEDIA

QUARANTA

KARANTINA BENTENG TERDEPAN PERTANIAN INDONESIA

RAKERNAS 2007 :

Merumuskan solusi program penataan administratif dan teknis di lapangan

Sidang SPS di Swiss :

Permentan 37 dan Kepmentan 36 menjadi *specific trade concern*.

Waspada! H06 Cholera

Entikong Musnahkan 100 ekor babi



Kabupaten dan Gubernur Lampung sesaat sebelum Dialog Agribisnis Lampung

Edisi: 1 - 2 / 2007



ISSN 0215-1489

RAKERNAS 2007 : MERUMUSKAN SOLUSI PROGRAM PENATAAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS DI TINGKAT LAPANGAN

Jakarta - 21 Januari 2007, bertempat di hotel Bidakara, Kepala Badan Karantina Pertanian membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Badan Karantina Pertanian tahun 2007. Rapat yang dihadiri oleh para pejabat eselon II, III, IV dan para tenaga ahli dan koordinator fungsional lingkup Badan Karantina Pertanian serta kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan seluruh Indonesia ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga tanggal 24 Januari 2007.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Karantina Pertanian menyampaikan bahwa Badan Karantina Pertanian pada Rakernas 2006 yang lalu telah berkomitmen untuk memfokuskan 3 (tiga) hal penting dalam menilai kinerja karantina pertanian, yaitu :

- Mampu melindungi negara dari ancaman masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan organisme pengganggu tumbuhan karantina.
- Mampu melakukanantisipasi persyaratan Sanitary and Phytosanitary (SPS) untuk akselerasi ekspor dan hambatan teknis importasi produk pertanian; Mampu menangkal masuknya produk-produk pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan, termasuk keamanan dan kehalalannya.

Dan telah disepakati pula, bahwa dalam upaya peningkatan kinerja harus diletakkan pada 6 pilar sub program Pembangunan Perkarantinaaan, yaitu:

- 1) Pembangunan infrastruktur (sarana/prasarana) karantina.
- 2) Pengembangan SDM.
- 3) Penguatan regulasi/peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengembangan sistem informasi dan teknologi;
- 5) pengembangan kelembagaan; serta
- 6) Pengembangan kerjasama internasional dan public awareness.

Untuk itu diharapkan ke-6 program ini hendaknya tidak hanya selesai dalam tataran konsep tetapi harus secara nyata diimplementasikan. Selanjutnya, Kepala Badan Karantina menyampaikan arahan bagi para kepala UPT disetiap permulaan kegiatan awal tahun anggaran hal-hal sebagai berikut mengevaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya, untuk mengatasi kelemahan dan kemajuan tahun berikutnya; menyatukan/meluruskan persepsi dan membangun komitmen tentang arah dan tujuan dan sasaran yang telah saudara tetapkan; menyiapkan langkah-langkah operasional program dan kegiatan 2007; serta menetapkan komitmen fokus sasaran yang akan dicapai.



ki-ka : Kapus Inkehati, Sekretaris Badan, Kepala Badan, Kapus Karantina Hewan, Kapus Karantina Tumbuhan.

Adapun hasil Rakernas kali ini, diharapkan mampu merumuskan kegiatan-kegiatan dan permasalahan operasional perkarantinaaan sehingga tidak ada hambatan karena peraturan dan pedoman yang sudah tidak relevan dapat dioperasionalkan. Kepala UPT diharapkan mampu memahami dan menangkap program-program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati serta menjabarkan dan menerapkannya secara konsisten di lapangan oleh petugas karantina.

Pokok-pokok kebijakan karantina pertanian yang tercantum dalam Rencana Strategis 2006 – 2009 yang telah dipahami bersama, merupakan acuan umum setiap pimpinan UPT dan masih memerlukan pentahapan sasaran tahunan dan prioritasnya, sehingga jelas arah dan tujuannya sesuai visi dan misi yang diemban. Pentahapan dan prioritas sasaran tahunan harus realistis dilaksanakan dan dioperasionalkan serta keluarannya dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ada hal yang baru pada penyelenggaraan Rakernas kali ini, yakni dengan dihidirkannya para narasumber dari instansi dalam dan luar Departemen Pertanian. Sebut saja, Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawasan kinerja internal, yang memberikan rambu-rambu peringatan agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak melanggar aturan yang mengarah kepada adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), unsur masyarakat lainnya yakni organisasi pengusaha, assosiasi pengguna jasa karantina serta media massa (pers) yang akan memberikan masukan dari sudut pandang lain. Kita memang sudah bekerja banyak tetapi masyarakat yang akan menilai kinerja kita, demikian menurut Kepala Badan.

beberapa program penataan administratif dan teknis yang masih menjadi permasalahan crussial di tingkat lapangan, perlu segera dirumuskan solusinya. Dibidang pengelolaan administrasi sangat diharapkan pelaksanaan SAI yang berkualitas, perencanaan yang berorientasi jangka menengah, pengelolaan barang inventaris tertib dan yang bertanggung jawab, pola karier yang konsisten, sistem data dan informasi yang mumpuni, serta pelaksanaan sistem perkarantinaan yang efektif.

Pada akhir sambutannya, Kepala Badan Karantina Pertanian menyampaikan permintaannya agar dalam Rakernas ini dapat dirumuskan agenda kerja 2007 yang mampu menyelesaikan masalah-masalah substansial dalam penyelenggaraan perkarantinaan. Agenda yang telah disepakati hendaknya dapat dijadikan acuan untuk dihasilkannya prestasi-prestasi besar Badan Karantina sehingga dapat mewujudkan Karantina yang tangguh, modern dan terpercaya di tahun 2009 (SI/ag).



Suasana tanya jawab dalam Rakernas 2007

KORSEL BANTU RI TANGGULANGI AI



Jakarta, 16 Februari 2007, Pemerintah Korea Selatan melalui Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Mr. Lee Sin-Jin menyerahkan bantuan secara simbolis senilai US\$ 500.000 kepada Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi wabah flu burung yang diterima langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Ir. Anton Apriyantono.

Bantuan dalam bentuk powder antiseptic, manual kanapsack sprayer dan anigen rapid AIV test ini diadakan oleh Pemerintah Korea Selatan melalui Lembaga Bantuan Kerjasama Internasional Korea Selatan (KOICA).

Menurut Menteri Pertanian, bantuan yang digunakan pendeteksian dini dan pengendalian lintas hewan di daerah perbatasan segera didistribusikan tidak saja ke unit-unit pelaksana teknis Karantina Hewan (UPT KH) dengan lalu lintas hewan terbanyak namun juga kepada UPT KH di wilayah yang masih bebas dan terancam AI di 11 UPT KH. Menurut data yang ada sejak bulan Agustus 2003 hingga bulan Januari 2007, daerah yang tertular AI adalah 30 propinsi, yang meliputi 223 kabupaten/kota dengan total jumlah kematian unggas lebih dari 12.000.000 ekor. Hingga kini 3 propinsi yang masih bebas penyakit AI, yakni : Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara. Pada kesempatan itu juga Menteri Pertanian menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah Korea Selatan dalam menanggulangi wabah yang cukup meresahkan ini.

Selanjutnya seluruh bantuan yang diterima, langsung diserahkan Menteri Pertanian kepada Kepala Badan Pertanian untuk dapat digunakan dalam rangka menanggulangi wabah avian influenza atau flu burung (BK/es)

(bersambung ke halaman 19

PERANAN KARANTINA PERTANIAN DIWILAYAH PERBATASAN DARAT SEBAGAI BERANDA DEPAN NEGARA

Oleh : Drh. Faisyal Noer
(Medik Veteriner Pertama SKH Kelas II Entikong)

Indonesia mempunyai wilayah-wilayah perbatasan dengan negara-negara Malaysia, Filipina, Papua New Guinea, Australia, Timor Leste serta Singapura, dimana wilayah-wilayah perbatasan tersebut mempunyai hubungan ekonomi dan perdagangan yang didasari oleh hubungan sosial budaya dan kekerabatan tradisional secara timbal balik yang erat.

Dari sekian banyak perbatasan yang disebutkan diatas terdapat perbatasan darat, dimana perbatasan darat Indonesia tersebut tersebar di 3 (tiga) pulau dan 4 (empat) propinsi yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Dari 4 (empat) propinsi tersebut 2 (dua) berada dipulau Kalimantan, yaitu Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan 8 (delapan) jumlah kabupaten. Perbatasan darat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur ini memiliki fungsi strategis ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan, demikian juga bila ditinjau dari segi ekonomi, sosial, politik maupun budayanya. Sejak era reformasi, pemerintah tidak lagi menempatkan wilayah perbatasan sebagai halaman belakang yang terabaikan, tetapi menempatkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara. Oleh karena itu, pendekatan pemerintah tidak lagi bersifat sektoral tetapi diubah pendekatannya melalui pendekatan multisektoral secara terpadu dalam suatu rencana induk percepatan pengembangan wilayah perbatasan, yang melibatkan instansi pusat maupun daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menetapkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah. Karena selama ini, pendekatan pemerintah terhadap wilayah perbatasan dilakukan secara sektoral, dimana masing-masing sektor melakukan pendekatan sendiri-sendiri untuk mengatasi permasalahan yang timbul tanpa berkoordinasi dan bekerjasama dengan sektor-sektor terkait lainnya. Berdasarkan PP No 39 Tahun 2005, maka program-program tersebut antara lain: Percepatan pembangunan prasarana dan sarana diwilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terisolir. Pengembangan ekonomi diwilayah perbatasan. Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang diwilayah perbatasan, salah satu kegiatan tersebut peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi dan pertahanan diwilayah Perbatasan Negara (CIQS).

Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara administratif terletak diwilayah perbatasan negara.

Dengan adanya program pada point 3 (tiga) di atas yang sesuai dengan PP No 39 Tahun 2005 maka secara umum dalam pengembangan wilayah perbatasan diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan wilayah perbatasan yang menyeluruh/holistic meliputi berbagai sector dan kegiatan pembangunan serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Mungkin saja pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan diproses baik secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah, sedangkan fungsi pelaksanaannya strategis sampai dengan operasional misalnya kebijakan dengan melakukan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dengan adanya kebijakan meningkatkan kesejahteraan tersebut maka perekonomian di wilayah perbatasan akan meningkat dan berjalan sehingga memungkinkan dibukanya pos-pos lintas batas baru.

Pembukaan pos lintas batas baru serta pengembangan perekonomian di wilayah perbatasan tersebut dipandang dari sudut karantina pertanian akan meningkatkan potensi keluar masuknya HPHK dan OPTK melalui lalu lintas orang, barang/komoditi pertanian serta alat angkut. Oleh karena itu, karantina pertanian dapat mempunyai peranan dalam bidang ekonomi khususnya produk pertanian dalam upaya melindungi usaha agribisnis, memfasilitasi perdagangan serta mendukung perekonomian di wilayah perbatasan sehingga kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dapat meningkat.



Pos Lintas Batas RI - Malaysia di Tawau

Peranan Karantina Pertanian di wilayah perbatasan

Untuk mewujudkan peranan karantina pertanian di wilayah perbatasan dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Peningkatan sumber daya manusia

Umumnya sumber daya manusia (petugas) karantina pertanian yang bertugas di wilayah perbatasan masih kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, berbagai upaya hendaknya dilakukan oleh Pusat untuk memperhatikan petugas di wilayah perbatasan misalnya pelatihan dan pendidikan, pemenuhan kebutuhan jumlah petugas di perbatasan serta adanya tunjangan khusus perbatasan sehingga petugas yang akan ditempatkan di wilayah perbatasan bersedia serta kebutuhan hidupnya akan tercukupi karena biaya hidup di wilayah perbatasan cukup tinggi. Peningkatan sarana dan prasarana.

Dengan meningkatnya sumber daya manusia hendaknya dapat diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana agar kinerja petugas lebih optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi karantina.

Petunjuk teknis

Dalam pelaksanaan karantina pertanian di wilayah perbatasan perlu diberikan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perkarantinaan pertanian di pos lintas batas atau perbatasan sehingga diharapkan adanya suatu kebijakan khusus di wilayah perbatasan.

Sosialisasi karantina pertanian

Tugas pokok dan fungsi karantina pertanian hendaknya dapat disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat menyadari betapa pentingnya peran karantina pertanian. Sosialisasi karantina pertanian dapat dilakukan pada semua lapisan masyarakat (masyarakat pemegang kebijakan, masyarakat pendidikan, masyarakat pers, masyarakat petani serta masyarakat umum) sehingga diharapkan peran karantina semakin kuat dan penting karena didukung oleh kesadaran yang tinggi dari semua lapisan masyarakat.

Koordinasi dengan instansi terkait

Koordinasi dapat terlaksana dan tercipta apabila sosialisasi karantina dapat mencapai tujuan sehingga kinerja karantina dapat optimal. Kerjasama dapat dikembangkan dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan. Dalam lingkup CIQS dapat dibuat suatu MoU dalam bentuk kerjasama operasional.

Menegakkan peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan apabila semua langkah-langkah di atas dapat dipenuhi secara optimal sehingga fungsi dan peran karantina



Masyarakat Perbatasan RI - Timor Leste

Dengan melaksanakan langkah-langkah di atas diharapkan karantina pertanian dapat ikut membantu kebijakan pemerintah untuk membangun dan pengembangan wilayah perbatasan sehingga membuka peluang berkembangnya perekonomian masyarakat perbatasan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006).

Dengan terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Karantina serta terselenggaranya pelayanan prima karantina pertanian di wilayah perbatasan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang berdampak positif terhadap pengembangan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan sehingga terciptanya wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara kita tercinta ini (FN/es).



Pelintas Batas di Atambua Nusa Tenggara Timur

COCOA POD BORER, MONSTER YANG DITAKUTI PAPUA NEW GUINEA

Oleh:

Aulia Nusantara, SP

(Staf Teknis Balai Karantina Tumbuhan Kelas II Jayapura)

Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan nasional di Indonesia. Saat ini kakao juga telah menjadi komoditi ekspor andalan di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Amerika Selatan dan Tengah, serta beberapa negara Asia Selatan dan Tenggara. Indonesia sendiri menduduki peringkat 3 (tiga) sebagai penghasil kakao terbesar di seluruh dunia (Tedesco, 2000). Saat ini pertanaman kakao mengalami perkembangan yang pesat dari segi pertambahan areal tanam. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya areal tanam di beberapa daerah yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi kakao. Salah satunya adalah Sulawesi Tenggara dimana pada tahun 1999, luas pertanaman kakao telah mencapai 109.516,70 ha, dengan produksi 71.491, 48 ton. Akibatnya diduga telah terbentuk jalur kakao (*cacao belt*) yaitu pertanaman kakao yang sambung menyambung pada hamparan yang sangat luas. Hal ini mengandung resiko kerugian oleh hama dan penyakit karena pemencaran yang cepat dari tempat awal serangan (Taufiq, 2001)

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No.16/1992 bahwa Karantina Tumbuhan berkewajiban untuk mencegah penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina tertentu untuk keluar dari wilayah Negara RI selama negara tujuan menghendaki. Hal ini sangat penting apabila dikaitkan dengan usaha meningkatkan posisi tawar kita dalam bidang perdagangan kakao dunia. Apalagi dengan status "tiga besar" yang disandangnya. Oleh karena itu perlu kiranya diperhatikan aspek-aspek yang dapat menjadi kendala bagi kesinambungan produksi kakao di Indonesia. Seperti yang diuraikan di atas bahwa perluasan perkebunan kakao yang sangat pesat dengan sistem budidaya secara monokultur memiliki resiko tinggi terhadap eksplosif hama. Apalagi tanaman kakao memiliki cukup banyak hama. Salah satu hama penting paling terkenal pada pertanaman kakao adalah hama penggerek buah kakao (PBK), *Conopomorpha cramerella* (Snellen) (Lepidoptera: Gracillariidae). Hama ini sebelumnya dideskripsikan dengan nama *Gracilaria cramerella*, *Zarantha cramerella* dan *Acrocercops cramerella*. Kemudian diubah Bradley menjadi *Conopomorpha cramerella* (Snellen) (Lepidoptera: Gracillariidae) pada tahun 1985 (Lumsden, 2004).

Conopomorpha cramerella pertamakali dilaporkan pada sekitar 1860-an di Sulawesi. Selanjutnya hama ditemukan pula di Pulau Jawa pada akhir abad 19. Permasalahan yang diakibatkan oleh hama yang juga dikenal dengan sebutan CPB ini terus berlanjut menuju area yang lebih luas, diantaranya kawasan Filipina.

Penyebarannya didukung pula oleh keberadaan beberapa tanaman inang lain, seperti Rambutan (*Nephelium lappaceum*, *Sapindaceae*), Cola (*Cola nitida*, *C. acuminata*, *Sterculiaceae*), dan Nam-nam (*Cynometra cauliflora*, *Leguminosae*). Faktor cuaca juga turut berperan dalam diseminasi *C. cramerella*, terutama laju angin. Meskipun mampu terbang sejauh 800 meter, *C. cramerella* tergolong serangga yang lemah sehingga arah sebaran sangat tergantung kepada angin (Lumsden, 2004).

Produksi kakao di Sulawesi, sebagai pulau utama penghasil 75 % dari total kakao di Indonesia, mulai terancam dengan adanya serangan penggerek buah kakao (PBK), *Conopomorpha cramerella*. Hama ini merupakan hama yang cukup berbahaya, karena dapat menurunkan produksi dari 15 % sampai 39 % (Tedesco, 2000). Bahkan literatur lain menyebutkan kerugian mencapai 82.2 % (Taufiq, 2001). Selain jumlah produksi (kuantitas) yang menurun drastis, PBK turut pula bertanggungjawab terhadap degradasi kualitas kakao. Outbreak *C. cramerella* juga pernah terjadi pada tahun 1991 di Sulawesi Tengah sehingga mengakibatkan kehilangan hasil yang besar. Sifat penyebaran hama ini relatif cepat dan masih sulit dikendalikan. Sejak tahun 1995 tercatat bahwa hama PBK baru menyerang kurang lebih 424,8 ha kakao di Sulawesi Tenggara. Tetapi saat ini luas serangan telah mencapai lebih dari 9.205,25 ha. Kerugian yang diakibatkan oleh hama ini di daerah ini ditaksir telah mencapai miliaran rupiah. Luas dan daerah sebaran ini akan terus meningkat bila pengendalian yang efektif dan efisien tidak dilakukan (Taufiq, 2001).



Biji Cacao

Pupa ini dibungkus oleh membran yang resisten terhadap lingkungan luar. Selain itu masa ekspose baik untuk insektisida sintetik maupun biopestisida pada umumnya relatif singkat. Untuk insektisida sintesis tentunya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekologi serangga. Dengan demikian perlu mencari agens pengendali alternatif yang dapat mengendalikan sekaligus dapat mencegah kerusakan sehingga mampu menekan populasi PBK dan mempertahankan produksi.

Dari beberapa riset diketahui bahwa terdapat musuh alami yang dapat digunakan untuk menekan populasi *C cramerella*. Diantaranya parasit untuk pupa meliputi: *Diaglyphidae roepkie*, *Photoptera erythronata*, *Mesostenus sp.*, dan *Paraphyax sp.* Sedangkan untuk parasit telur adalah *Trichogrammatoidea bactrae fumata*. Sementara itu golongan semut, seperti: *Oecophyla smaragdina*, *Iridomyrmex anceps*, *Anoplolepis longipes*, *Crematogaster sp.* dan *Dolichoderus torachicus* merupakan predator bagi larva *C cramerella* (Lumsden, 2004).

Saat ini yang sudah marak adalah pengembangan jamur *Beauveria bassiana* sebagai agens hayati untuk mengendalikan PBK. Adapun proses infeksi *Beauveria bassiana* terhadap *C. cramerella* adalah dengan cara langsung menembus kutikula. Sora yang jatuh pada permukaan kutikula berkecambah dan untuk menembus lapisan kutikula digunakan tabung penetrasi yang dibentuk pada ujung tabung kecambah. Setelah mencapai saluran pembuluh darah, jamur tumbuh dengan pesat sehingga nutrisi di dalam tubuh terkuras, darah menjadi kental, dan akhirnya mati. Selain *B bassiana*, jamur entomopatogen yang dapat digunakan untuk mengendalikan *C cramerella* adalah *Paecilomyces fumosoroseus* (Lumsden, 2004).

Referensi:

- Anonymous. 2001. Sustainable Cocoa Production System. Pesticide Action Network United Kingdom
- Anonymous. 2006. PNG: East New Britain Province Placed Under "Agricultural Quarantine". Pacific Magazine : April 06, 2006
- Lumsden, R. D. 2004. Cocoa Pod Borer. World Cocoa Foundation Research Update: July 2004
- Taufiq, M. 2001. Sebuah Pemikiran Tentang Pengendalian Hama Penggerek Buah Kakao (*Conopomorpha Cramerella* (Snellen)) Di Sulawesi Tenggara. Makalah Falsafah Sains Program Pasca Sarjana / 53 Institut Pertanian Bogor
- Tedesco, E. 2000. Cocoa Industry Seeks to Protect Supplies Via Foundation. <http://CMA - Chocolate Manufacturers Association.htm>

INDONESIA
Oh Palm

Protect Our Palm
from Lethal Yellowing

Indonesia Agricultural Quarantine Agency
www.karantina.deptan.go.id

the first line defence of Indonesia's agriculture

INDONESIA
Free from FMD
(OIE Resolution No IX/1999)

NO ENTRY FMD

for further information
please visit:
Quarantine Office or
www.karantina.deptan.go.id

Indonesia Agricultural Quarantine Agency

BKT Kelas I Panjang Gelar Dialog Agribisnis Lampung

Bandar Lampung – 7 Maret 2007 Balai Karantina Tumbuhan Kelas 1 Panjang menggelar acara akbar bertajuk Lampung Agribisnis Dialog. Acara yang menghadirkan Kepala Badan Karantina Pertanian, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dan juga Gubernur Propinsi Lampung ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan pandangan tentang pola agribisnis yang tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

Lampung, yang dikenal dengan "Sai Bumi Ruwa Jurai" sangat pantas dijuluki Bumi Agribisnis, hal ini dilatarbelakangi dengan potensi sumber daya alam yang besar dan berlimpah. Menurut Kepala Balai Karantina Tumbuhan Kelas 1 Panjang, Ir. Hermansyah, MM potensi sumber daya alam yang besar ini perlu dukungan manajemen agribisnis yang terpola dan modern, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat propinsi ini dapat menjadi lebih baik. Untuk itu lanjutnya, para narasumber yang berkompeten dibidangnya diundang dalam dialog yang dihadiri oleh lebih dari 200 orang yang terdiri dari para pejabat pemerintah propinsi Lampung, pejabat Muspida Propinsi dan Kabupaten, para pelaku bisnis, eksportir dan importir pengguna jasa karantina, pers dan LSM terkait dengan tema : Memaksimalkan Potensi Sumberdaya Lokal Propinsi Lampung untuk Menembus Pasar Global di Bidang Agribisnis.

Terminal Agribisnis

Dalam sambutan tanpa teks yang disampaikan dengan cara bersahaja dan cukup menarik, Gubernur Propinsi Lampung mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kepala BKT Kelas I Panjang, yang memang baru bertugas kurang lebih 2 minggu ini. Disampaikannya, keprihatinan akan kondisi propinsi Lampung dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah namun masih ada warganya yang tergolong miskin. Diperlukan kerjasama untuk dapat segera mengentaskan masalah ini, apalagi masyarakat golongan miskin tersebut adalah petani. Untuk itu kedepan dirinya merencanakan membangun terminal agribisnis modern yang diharapkan mampu mendongkrak hasil produk pertanian, mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk bertani dan menekan urbanisasi karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Gubernur menganalogikan Propinsi Lampung sebagai Dragon Gate atau mulut naga pulau Sumatra, sehubungan dengan letak geografisnya yang strategis di pintu masuk dan keluar pulau Sumatra. Untuk itu peran Karantina Pertanian amat sangat diperlukan bagi perlindungan dari masuknya dan tersebarnya HPHK dan OPTK.

Menuju Pasar Global

Kepala Badan Karantina Pertanian, dalam paparannya menyampaikan bahwa Propinsi Lampung dengan keunggulan komparatifnya berupa varietas, iklim dan sumber daya alamnya memerlukan penguatan keunggulan kompetitif berupa teknologi budidaya dan pasca panen, sistem penanganan dan pengembangan mutu dan jaminan mutu dan keamanan pangan, peningkatan kepercayaan negara mitra dan branding wilayah.

Untuk itu, langkah-langkah strategis yang perlu diperkuat adalah : memperkuat kepercayaan negara mitra, memperkuat sistem penanganan dan pengawasan mutu dan keamanan produk serta memperkuat citra produk pertanian Lampung. Dimana hal yang terakhir juga disampaikan dalam sambutan Gubernur yakni disadari akan kurangnya promosi hasil produk pertanian Lampung. Dalam akhir paparannya Kepala Badan Karantina menyampaikan strategi memperkuat image produk pertanian Lampung, yakni :

Produk Pertanian dijamin bebas penyakit.
Produk Pertanian dijamin aman dikonsumsi
Pencantuman logo yang mencerminkan produk pertanian Lampung ramah lingkungan, aman dikonsumsi dan bebas penyakit.

Dialog yang merupakan seri ke-1 format acara sosialisasi BKT Kelas 1 Panjang ini ditutup dengan diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh pemandu diskusi Direktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Universitas Lampung (HS//es).



Kepala BKT Kelas I Panjang tengah menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers

Kupang Memusnahkan 1.300 ekor anak ayam



Pemusnahan 1.300 ekor anak ayam
di TJ Balai Asahan

Kupang, Februari 2007 -- Kasie Indok BKH Klas I Tenau, Kupang Drh. I Putu G. Suwarjaya melaporkan pemusnahan 1.300 ekor anak ayam asal Surabaya milik CV Kuda Hitam yang masuk ke wilayah NTT melalui Bandara El Tari, Kupang.

Anak ayam yang dimusnahkan ini dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan oleh SK Gubernur NTT Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penolakan, Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Avian Influenza (Flu Burung) di Propinsi Nusa Tenggara Timur. SK Gubernur tersebut tentang penetapan tiga perusahaan yang dapat mensuplai anak ayam dari Surabaya, yakni PT Wonokoyo, PT Charoen Pokphan dan PT Multi Brider, sehingga pensuplai ayam ke wilayah NTT selain ke-3 perusahaan tersebut harus ditolak.

Saat dikonfirmasi mengenai keterangan dari pemilik yang telah memiliki dokumen lengkap serta rekomendasi resmi dari Dinas Peternakan Kabupaten Kupang untuk mendistribusikan ayam, pihak Karantina Tumbuhan menjelaskan bahwa penangkapan dan pemusnahan ini tidak bermaksud untuk merugikan siapa pun atau pihak-pihak tertentu tetapi semata-mata untuk menegakkan aturan, pihaknya juga telah meminta pemilik untuk mengirim kembali anak ayam yang dikemas dalam 13 box ini ke Surabaya namun karena pertimbangan biaya yang lebih besar, pemilik akhirnya menyetujui untuk dilakukan tindakan pemusnahan dengan cara dibakar. (PS/es)

Guna cegah H06 Colera BKH Sentani musnahkan Babi tanpa dokumen



Pemusnahan Babi di BKH Sentani

Jayapura, Januari 2006 – Balai Karantina Hewan Kelas II Sentani Wilker Pelabuhan Jayapura memusnahkan 4 ekor babi dan seekor ayam dengan cara disuntik larutan garam Inggris dan selanjutnya dikubur. Ke-empat ekor babi dan seekor ayam tersebut dibawa dengan menumpang KM Sinabung tanpa disertai dokumen lengkap.

Pemusnahan yang dilakukan di halaman kantor Karantina Hewan Wilker Pelabuhan Jayapura disaksikan oleh petugas KP3 Laut, KPLP, Kasie Infodok Balai Karantina Hewan Kelas I Sentani dan masyarakat setempat. Saat memberikan penjelasan sebelum dilakukan tindakan karantina berupa pemusnahan.

Kepala BKH Sentani menyampaikan bahwa pemusnahan ini dalam upaya untuk mencegah masuknya wabah penyakit hog colera yang menyerang babi, apalagi daerah Sulawesi diketahui merupakan endemic hog colera dan antrax. BKH Kls II akan terus meningkatkan kewaspadaannya demi untuk mempertahankan wilayah Papua yang sejak tahun 2003 masih merupakan dari sedikit wilayah di Indonesia yang bebas Antrax dan Flu Burung.

Kasie Infodok BKH Sentani, Boas Henry Lumbaa menambahkan pemusnahan ini berkat kerjasama yang baik antara instansi terkait di Pelabuhan Jayapura. (BL/es)

Berhasil pertahankan wilayah Gorontalo dari Flu Burung & Antrax, Komisi IV DPR Kunjungi SKH Gorontalo



Gorontalo, Januari 2007 – Kepala Stasiun Karantina Hewan Gorontalo, Drh Nur Hartanto menyampaikan paparan profil stasiun yang dipimpinnya kepada rombongan anggota Komisi IV DPR-RI yang dipimpin oleh Ir. Suswono. Selain menyampaikan program kerja yang telah dan akan dilaksanakan, disampaikan dengan kondisi karantina hewan Gorontalo pasca banjir, dengan jumlah pegawai yang terbatas, sarana dan prasarana yang banyak rusak termasuk alat dan bahan lab, SKH Gorontalo masih dapat mempertahankan wilayah ini menjadi wilayah yang masih bebas Flu Burung dan Antrax.

Dari hasil diskusi dengan para anggota Dewan, didapat saran-saran sebagai berikut :

- Perlunya penambahan personil, khususnya dokter hewan dan paramedik.
- Penambahan dan perbaikan alat-alat laboratorium pendukung tindakan karantina.
- Perlunya pengadaan tanah untuk kantor di daerah yang bebas banjir dan berdekatan dengan karantina tumbuhan dan ikan.
- Perlunya relokasi/tukar guling untuk lahan yang digunakan untuk wilker Kwandang karena lokasinya terlalu jauh dengan pelabuhan.
- Diperlukan upaya perbaikan sarana, prasarana serta layanan sehingga target penerimaan PNBP tidak lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya pertemuan dilanjutkan dengan tatap muka dengan jajaran pemerintah Propinsi Gorontalo yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo, Ir. Fadel Muhammad. (NH/es)

SKT Kelas I Tanjung Balai Asahan Musnahkan Buah Asal Malaysia



Teluk Nibung, 19 Januari -- Kepala SKT Kelas II Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan, memusnahkan sembilan kotak buah asal Malaysia yang masing-masing terdiri dari 5 kotak Apel merk Fuji dan 4 kotak buah Pir merk Wucheng.

Pemusnahan buah ini dilakukan setelah ditangkap Satuan Polsek Teluk Nibung, kemudian diserahkan ke kantor SKT Kelas II Pelabuhan Teluk Nibung. Acara pemusnahan yang disaksikan oleh para pejabat dan aparat terkait diantaranya Kapolsek Teluk Nibung, KP3 Pelabuhan Teluk Nibung, pejabat Bea Cukai dan pejabat Syahbandar (AdPel) Pelabuhan Teluk Nibung.

Saat menyampaikan keterangannya, Kepala SKT Kelas II Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan, Ir. Joni Anwar mengemukakan alasan pemusnahannya yang didasari ketentuan hukum PERMENTAN No. 37 Tahun 2006 bahwa Teluk Nibung bukan merupakan tempat pemasukan buah impor sehingga buah hasil tangkapannya tidak diperkenankan masuk ke wilayah Republik Indonesia. Pihaknya, lanjut Joni Anwar telah memberikan waktu 14 hari (jatuh tempo) lamanya untuk melakukan pengiriman kembali ke negara Malaysia, namun hal ini tidak dilakukan oleh pemilik sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke-9 kotak buah tersebut harus dimusnahkan (JA/es)

LANGASKARA 2007



Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Syukur Iwantoro MS MBA memimpin upacara pembukaan Langaskara TA 2007 di Rindam Jaya



Penyematan tanda peserta Langaskara secara simbolis oleh Kepala Barantan



Peserta pelatihan Langaskara tengah mengikuti upacara dilapangan



Sekretaris Badan, Ir. Hari Priyono MSi menyerahkan sertifikat kepada peserta saat penutupan pelatihan.



Nampak wajah riang peserta sesaat setelah menerima sertifikat kelulusan pelatihan Langaskara TA 2007

Buaya Muara di Stand Barantan pada Pameran Agrinex 2007



Jakarta, Maret 2007 – Bertempat di ruang Assembly Jakarta Convention Center, Badan Karantina Pertanian turut berpartisipasi pada Paviliun Departemen Pertanian di Pameran Agrinex tanggal 16 – 18 Maret 2007.

Untuk memberikan daya tarik tersendiri, stand Barantan menampilkan hasil tangkapan Stasiun Karantina Hewan Merak berupa 3 ekor anak buaya muara. Ke-3 ekor binatang yang menjadi daya tarik pengunjung ini merupakan 'pinjaman' tampilan disamping pinjaman tampilan lainnya yang berasal dari BBKT dan BKH Tanjung Priok, SKT Merak, BKH & BKT Soekarno Hatta serta Bidang Teknik & Metoda Pusat Karantina Tumbuhan dan Hewan. Kiat menampilkan tampilan unik mendapat respon yang cukup baik dari pengunjung yang berdampak pada habisnya materi cetak dan publikasi Barantan dan kesibukan stand guide menjelaskan tupoksi Barantan selama pameran berlangsung.

Seperti halnya pada kegiatan pameran-pameran yang diikuti oleh Barantan, diharapkan dapat meningkatkan *awareness* sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melindungi pertanian Indonesia, semoga !



Bibit Tanaman Ilegal Asal Cina Digagalkan BBKT Tanjung Priok



Sawangan – 25 Januari 2007 Balai Besar Karantina Tumbuhan Tanjung Priok berhasil menggagalkan penyeludupan 7 kontainer bibit tanaman hias Adenium dan Picus senilai Rp. 250 juta asal dari Cina.

Bibit yang direncanakan akan dibesarkan di Indonesia dan diekspor kembali di Cina dengan harga yang lebih tinggi ini, diimpor oleh perusahaan dibidang otomotif, PT Central Olympindo Auto. Menurut Kepala BBKT Tanjung Priok, Indra Mulya, walaupun seluruh kelengkapan dokumen maupun surat perijinan dari negara asal tersebut sebenarnya telah dipenuhi, namun importir telah berupaya untuk memasukkan barangnya tanpa melalui prosedur pemeriksaan laboratorium Karantina Pertanian. Hal ini tentunya amat berbahaya, karena jika komoditas tersebut ternyata mengandung organisme pengganggu tumbuhan maupun penyakit dan berhasil lolos tanpa pemeriksaan pihak Karantina dan beredar dipasaran maka akhirnya menyerang tidak hanya tanaman maupun hewan namun bisa saja kepada manusia, sehingga kerugian yang diderita menjadi amat besar.

Adi Bintono, Direktur PT Central Olympindo Auto yang mengaku baru saja merintis usaha agribisnis ini menyatakan tidak mengetahui prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan karena pihaknya telah menyerahkan semua penanganannya kepada perusahaan ekspidisi, PT Dwijaya. Kedepan masalah akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku.

Koordinasi Karantina Tumbuhan di Pelabuhan Laut Jayapura Bahas Bioterrorisme



Era globalisasi dapat memberikan dampak negatif bagi negara-negara di dunia, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Salah satunya adalah potensi masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke Wilayah Indonesia yang dapat mengakibatkan kerusakan pertanian dan ekosistem. Oleh karena itu Karantina Tumbuhan mempunyai tanggungjawab besar untuk mengantisipasi ancaman berkala internasional tersebut (bioterrorisme). Demikian diungkapkan Alamsyah Umar, selaku Kasi Informasi dan Dokumentasi Balai Karantina Tumbuhan Kelas II Jayapura.

Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama Balai Karantina Tumbuhan Kelas II Jayapura dan Kantor Administrator Pelabuhan Laut Jayapura tersebut digelar pada tanggal 23 Desember 2006, dihadiri diantaranya adalah LANTAMAL V Jayapura, Polsek KP3 Laut Jayapura, Satpol Air Resta Jayapura, Bulog Divre Papua, Bea Cukai, Balai Karantina Hewan Kelas II Sentani, Balai Karantina Ikan Sentani, Karantina Kesehatan Pelabuhan Laut Jayapura, Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jayapura, SPIL, EMKL, Harian Cendrawasih Pos, RRI Regional V Kotamadya Jayapura dan para pengguna jasa. Pelabuhan Laut Jayapura, Irianto Dahlan, SH, dikemukakan kembali kedudukan karantina tumbuhan dalam hukum pertanian di Indonesia. Alamsyah Umar selaku narasumber mengemukakan pentingnya menumbuhkan kembali kesadaran hukum masyarakat Indonesia, dalam kaitannya dengan hukum perkarantinaan di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat masih terdapat unsur masyarakat, termasuk aparat sendiri, yang masih belum memahami Karantina Tumbuhan dan pola kerjanya. Dalam kegiatan yang berlangsung sampai tengah hari tersebut, Kepala Balai David Daud Suweny, SP, juga memberikan paparan sekelumit mengenai jenis-jenis OPTK yang belum ada di tanah Papua.

Staf Ahli Mentan Bidang SDM & ASEP Bidang Kelembagaan Menpan Kunjungi UPT Barantan di Semarang

Semarang, 14 Februari 2007 - Bertempat di ruang rapat BKH Kelas 1 Tanjung Emas, Semarang, Dr. Achmad MSi, Staf Ahli Menteti Pertanian bidang Sumber Daya Manusia mengunjungi BKH dan BKT Kelas I Tanjung Emas. Kunjungan ini dalam rangka membangun SDM Pertanian yang amanah. Berikut adalah petikan dari ceramahnya, semoga bermanfaat !

Sebagai insan yang amanah diharapkan para pegawai khususnya di Departemen Pertanian dapat menyampaikan dan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pertama mempunyai niat yang ikhlas karena Allah. Setiap kebaikan merupakan karunia dari Allah, sehingga seseorang tidak bisa mengklaim bahwa keberhasilan adalah merupakan usaha dari seseorang tanpa ada campur tangan dan Ridlo dari Allah. Segala kejadian adalah atas kehendak Allah, tiada kekuatan selain Dia.

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi grafik yang fluktuatif, kadang naik kadang turun. Diharapkan di akhir hayat grafik kita naik sehingga menjadi orang yang khusnuk khotimah. Oleh karena itu kita hendaknya bisa berhijrah sebagaimana surat Albaqoroh 218. Orang-orang yang berhijrah adalah orang yang cintanya kepada Allah melebihi cintanya dari yang lain.

Hijrah mempunyai berarti pindah. Pindah mempunyai arti yang luas, tidak hanya pindah tempat tapi juga pindah perilaku. Pindah dalam arti tempat adalah kalau di suatu tempat, dimana seseorang sudah tidak bisa lagi melaksanakan perintah Allah, maka hendaklah seseorang tersebut berpindah tempat.

Namun di Indonesia ini di seluruh tempat semua orang muslim dapat melaksanakan perintah Allah tanpa adanya ancaman maupun gangguan. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu hijrah, dari yang tadinya malas menjadi rajin.

Dari yang berperilaku kurang baik menjadi baik, dari yang kurang beribadah menjadi lebih rajin beribadah.

Dan tepatlah dilaksanakan semboyan " hari ini lebih baik dari hari kemarin", agar kehidupan kita meningkat ke arah yang positif sehingga harapan menjadi "khusnul khotimah" akan terwujud.



Semarang - 22 Januari 2007, Didampingi oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Ir. Hari Priyono, MSi, Asisten Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Aparatur Negara, Petrus Bada Peduli mengadakan kunjungan kerja ke Balat Karantina Tumbuhan dan Balai Karantina Hewan Kelas I Tanjung Perak, Semarang.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan masukan untuk mendapatk masukan dari daerah untuk melengkapi kriteria dan parameter penilaian peringkat besaran organisasi suatu UPT lingkup Badan Karantina Pertanian. Dalam kunjungan ini juga didampingi Kepala BBKT Tanjung Priok, Indra Mulya, S.Sos, MM, Staf Barantan dan staf Biro kepegawaian Departemen Pertanian. Kunjungan dilakukan dengan tatap muka bersama para staf BKH/BKT kelas I Tanjung Emas dilaksanakan di ruang rapat Balai Karantina Hewan Kelas I Tanjung Emas.

Selain untuk mendapatkan masukan juga untuk mensosialisasikan pengertian dan pemahaman parameter suatu UPT yang akan diberlakukan pada seluruh UPT lingkup Badan Karantina Pertanian. Pada kesempatan ini Bp. Petrus juga menyampaikan bahwa fokus ini adalah fokus wilayah yang merupakan prioritas strategis yaitu pelabuhan utama : Medan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pelud Soekarno-Hatta dan Makasar. Sedang pelabuhan/tempat-tempat lain mengikuti parameter yang akan ditetapkan kemudian yakni meliputi aspek utama dan aspek penunjang.

Sebelum mengakhiri kunjungan di Semarang, Bp. Petrus beserta rombongan menyempatkan diri mengunjungi kantor BKT Kelas I Tanjung Emas dan bertatap muka dengan para staf yang ada di kantor tersebut.

100 Babi illegal asal Malaysia dimusnahkan di Entikong



Singkawang, 5 Februari 2007 - Berbekal informasi via SMS dari masyarakat yang melaporkan adanya upaya penyelundupan babi asal Serawak - Malaysia melalui pos lintas batas Jagoi Babang dengan tujuan kota Singkawang, Kepala Stasiun Karantina Hewan Kelas II Entikong, Drh. Adi Mardin segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Setelah disinyalir 100 ekor babi yang ditampung di lokasi penampungan babi milik Aloysius Nurdiansyah ini berjenis unggul hasil persilangan Yorksaire dan Duroc dengan usia sekitar 2 bulan dan berat 20 - 30 kg namun tidak memiliki dokumen lengkap.

Hal ini terus ditindaklanjuti dengan pengecekan dengan berkoordinasi dengan kantor peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten Bengkayang.

Dari kantor ini didapat penjelasan bahwa modus operasi yang dilakukan para penyeludup ternak ini adalah dengan cara babi dimasukkan ke wilayah Jagoi Babang dengan jumlah sedikit-sedikit kemudian dikumpulkan suatu tempat kemudian setelah terkumpul baru dibawa ke kota Singkawang dilakukan pada malam hari.

Perlu diinformasikan bahwa Jagoi Babang termasuk salah satu wilayah kerja SKH Kelas II Entikong, jarak dengan UPT Stasiun Karantina Hewan Kelas II Entikong \pm 300km, dimana menurut perjanjian Sosek Malindo antara Indonesia dan Malaysia (Kalimantan Barat dan Serawak menyatakan Jagoi Babang belum dibuka sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) hanya sebagai Pos Lintas Batas (PLB), tidak boleh dilakukan transaksi dagang, mengeluarkan dan atau memasukan dari dan ke Indonesia (Kalimantan Barat) maupun dari dan ke Malaysia (Serawak).

Adapun pintu-pintu perbatasan yang sudah dibuka/disepakati adalah Entikong (1991), Badau (2005) dan rencananya tahun 2008 Sajingan (Kabupaten Sambas).

Pintu-pintu inilah yang boleh dilalulintaskan hasil transaksi dagang (ekspor dan impor). Sedangkan Badau sampai saat ini walaupun sudah disepakati pada tahun 2005 sebagai PPLB namun di pihak Malaysia belum membangun Sarana dan Prasarana PPLB untuk menunjang kegiatan (CQIS) di perbatasan Lubok Hantu (Malaysia), sedangkan pihak Indonesia sudah ada kantor PLB di Perbatasan Badau, jarak Badai dengan UPT SKH Kelas II Entikong \pm 600 km, dengan kondisi jalan yang rusak \pm 2 hari perjalanan, sedangkan melewati Malaysia (Serawak) hanya \pm 4 jam perjalanan.

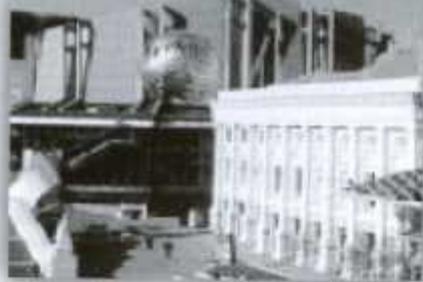


Selanjutnya dengan bukti yang ada, pihak Kepolisian meminta SKH Kelas II Entikong menjadi saksi ahli perkara Babi Illegal. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan juga SK Gubernur No. 259 Tahun 2005 tentang penutupan sementara propinsi Kalimantan Barat terhadap Pemasukan Ternak Unggas, Babi dan produknya sebagaimana kita ketahui Malaysia belum bebas dari PMK dan Nipah Virus.

Untuk pelaksanaan pemusnahan ternak illegal tersebut, tim teknis yang terdiri dari SKH Kelas II Entikong dan Dinas Agribisnis kota Singkawang dibentuk untuk memberikan masukan kepada pihak penyidik Polri mengenai teknik pemusnahan babi tersebut.

Akhirnya dengan disaksikan Kepala Pusat Karantina Hewan dari Badan Karantina Pertanian, Drh. Kisman A. Rasyid, MM, Kepala Dinas Peternakan dan Kehewanan Propinsi Kalimantan Barat dan Wakil Walikota, Singkawang dan tokoh masyarakat, ke-100 babi asal Malaysia dimusnahkan dengan cara eutanasi dengan strichnin, dibakar dan dikubur massal dalam lubang besar. (KR/es)

Pertemuan Komite Negosiasi Dagang ke-8 ASEAN, Australia dan New Zealand di Gelar di Wellington, NZ



Bertempat di Wellington Conference Centre, Wellington, New Zealand pertemuan ke-8 ASEAN-Australia-New Zealand Trade Negotiating Committee (AANTNC) diselenggarakan pada tanggal 4 - 9 Maret 2007 yang lalu.

Badan Karantina Pertanian yang diwakili oleh Ir. Hari Priyono MSi (Sekretaris Badan) dan Drs. Wahono Diphayana, MEC (Kabag Kerjasama dan Humas) bersama-sama dengan wakil-wakil dari instansi terkait dari Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, BKPM, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Departemen Kominfo, Departemen Perindustrian dan KPPU Wellington menghadiri pertemuan yang merupakan rangkaian pertemuan negosiasi dalam rangka pembentukan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). Kesepakatan untuk membentuk AANZFTA yang bersifat komprehensif ini disetujui para kepala negara ASEAN, Australia dan New Zealand pada pertemuan Summit di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004 yang lalu. Selanjutnya dalam jangka waktu 2 tahun sudah dicapai kesepakatan-kesepakatan dalam bidang perdagangan barang (*trade on goods*), jasa (*services*) dan investasi (*investment*). Untuk diketahui Barantan pertama kali di undang membahas draft SPS chapter pada pertemuan ke-4 ANNZTNC di Vientiane, Laos.

Secara umum pertemuan dibagi 2 yaitu pertemuan Caucus ASEAN pada tanggal 4 - 5 Maret 2007 dan pertemuan AANTNC pada tanggal 6 - 9 Maret 2007. Dalam AANZTNC dilakukan berbagai pertemuan Working Group (WG), yang meliputi WG on Goods, Services, Investment, Rules of Origin, Legal and Institutional Issues and Economic Cooperations. Disamping itu diadakan pertemuan khusus experts on SPS dan experts on TBT. Wakil dari Barantan mengikuti pertemuan experts on SPS.

Kunjungan Barantan ke New Zealand Food Safety Authority (NZFSA)

Deputy Director (Export Standard) NZFSA, Dr. Bill Jolly mengundang wakil dari Barantan untuk mengunjungi kantornya disela-sela jadwal pertemuan, 7 maret 2007. Kunjungan dimaksud selain untuk mendapat penjelasan mengenai organisasi NZFSA, juga untuk mendapat penjelasan pelaksanaan e-Certificate.

NZFSA yang berada dibawah Minister for Food Safety yang menangani food related legislation ini memiliki dua fungsi utama yakni : (1) melindungi dan meningkatkan kesehatan dan keamanan public (2) memfasilitasi market access untuk makanan dan produk-produk bahan makanan lainnya dari New Zealand. Dengan dipimpin oleh Executive Director (Mr. Andre McKenzie) yang membawahi 9 direktur masing-masing adalah Director Communications and Infrastructure, Director Export Standard, Director Market Access, Director Science, Director Policy and Food Standards, Director Compliance and Investigation, Director Approval and Agricultural Compounds and Veterinary Medicines, Director New Zealand Standards and Director Verification Agency.

NZFSA mempunyai hubungan dengan Director General yang berada di bawah Minister of Agriculture and Forestry, yang menangani ownership and non-food related legislation, terkait masalah accountability and relationship.

Demonstrasi penanganan dan aplikasi pelaksanaan e-Certificate menjadi agenda selanjutnya pada kunjungan wakil Barantan di kantor NZFSA (WD/es)



Mengikuti Sidang Komite SPS ke- 38 di Swiss: Permentan 37 dan Kepmentan 36 Menjadi Pembahasan Specific Trade Concern

Oleh
Suwardi Suryaningrat, SP, MSc
Kasubbag Humas - Barantan



Pada tanggal 26 Februari - 2 Maret 2007 lalu, Badan Karantina Pertanian mengirimkan wakilnya untuk mengikuti sidang Komite Sanitary dan Phytosanitary ke 38 di William Rapard, Markas Besar WTO di Jenewa, Swiss.

Adapun susunan Delegasi Republik Indonesia adalah : Asianto Sinambela dari Direktur Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Departemen Luar Negeri, M.I. Derry Aman Sekretaris I Perwakilan Tetap RI untuk WTO, Untung Suwarso Akses Pasar Barang Pertanian Direktorat Kerjasama Multilateral Departemen Perdagangan, Luhut Sianturi Perwakilan Tetap RI untuk WTO dan Suwardi Suryaningrat, SP, MSc sebagai wakil dari Badan Karantina Pertanian.

Seperti halnya sidang-sidang komite yang lalu, rangkaian Sidang ke-38 ini terdiri dari : (1) Sidang informal Komite SPS tanggal 26-27 Pebruari 2006 yang membahas beberapa isu yaitu; "Special and Differential Treatment"; "Transparency"; serta "Review of the Agreement" tentang ekuivalensi (artikel 4) dan regionalisasi (artikel 6) ; (2) Sidang Reguler dilanjutkan pada tanggal 28 Pebruari - 1 Maret 2007 dimana pada bagian akhir dari Rangkaian Sidang Reguler diadakan "International Dairy Roundtable" pada tanggal 2 Maret 2007.

Berikut disampaikan detail pembahasan hasil sidang yang akan dirangkai dalam 2 (dua) edisi, dengan harapan hasil sidang dapat dipublikasikan dengan utuh, semoga bermanfaat !

Pembahasan Agenda Sidang komite SPS-WTO 38

Specific trade concerns terhadap Indonesia, yaitu:

- Concern AS atas "lack of recognition of pest free areas in the US" dan terkait dengan SK Mentan No. 37/2006
- Concern Brazil atas kebijakan larangan impor produk daging dengan alasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- Concern Australia atas kebijakan impor hewan dan produk daging.
- Petemuan dengan delegasi China "public awereness" dalam kerangka kerjasama teknis *National Workshop* selama 2 (dua) hari untuk dapat dilaksanakan pada bulan Juli 2007. Dari Sekretariat WTO Ms. Christina sudah menyatakan pelaksanaan Nasional Workshop di Jakarta dengan tanggal akan ditetapkan kemudian. Tentatif program dan tempat pelaksanaan dan peserta workshop ditentukan kemudian. Kontak person untuk pelaksanaan workshop dari Sekretariat WTO adalah Ms. Christina, sedangkan kontak person dari Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat dari Badan Karantina Pertanian.

Pertemuan Bilateral

2.1. Pertemuan dengan Amerika Serikat

Pertemuan dengan delegasi Amerika Serikat dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2007 hari Rabu pukul 09.00 - 10.00 waktu Jenewa.

Delegasi Amerika Serikat Dipimpin oleh Eric S. Nicols, Director for Trade Policy Western Hemisphere, APHIS - USDA, Marcus E. Lower, Deputy Director International Regulation and Standar Division - Foreign Agriculture Service Office of Scientific and Technical Affairs - USDA, dan Christine Strossman, Agriculture Attache US Mission to the WTO.

Delegasi dari Indonesia adalah: Asianto Sinambela, M.I. Derry Aman, Untung Suwarso, Luhut Sianturi, dan Suwardi Suryaningrat.

Berkaitan dengan agenda Specific Trade Concern, Amerika Serikat mengajukan Peraturan Menteri Pertanian No. 37/2006 dan Keputusan Menteri Pertanian No. 64/2006 tentang kebijakan importasi daging dan produknya.

Posisi Amerika tetap mempertanyakan tentang komoditas buah-buahan dari Amerika tidak dapat masuk ke Indonesia berkaitan dengan Hama lalat buah yaitu Mediteranean Fruit Fly dan Appel Maggot. Untuk Anggur dengan Med Flies nya, pihak Amerika Serikat puas dengan adanya pengakuan Pest free Area akan tetapi untuk hama Apple maggot dan semua yang menjadi host atau media pembawa applemaggot, pihak Amerika Serikat masih menuntut risk assessment dan justifikasi ilmiahnya. Amerika dirugikan dengan adanya restriksi pada beberapa buah-buahan yang menjadi media pembawa applemaggot.

Ketua delegasi Amerika sempat mempertanyakan tentang kondisi klimatisasi dari Apple maggot yang kemungkinan tidak dapat hidup di Indonesia sehingga alasan melarang apel dan buah-buahan lainnya karena hama appel maggot menjadi tidak tepat.

Amerika juga masih mempertanyakan kebijakan Indonesia tentang importasi Daging, Karkas dan meminta klarifikasi Keputusan Menteri Pertanian No. 64/2006 tentang pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging dan jeroan dari luar negeri. Posisi Amerika saat ini masih menginginkan justifikasi ilmiah yang mendukung kebijakan tersebut misalnya dengan risk assessment baik untuk importasi buah maupun daging sesuai dengan perjanjian sps.

Delegasi Indonesia Menyampaikan bahwa Peraturan Menteri No. 37 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan/atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam wilayah Republik Indonesia.

1 Peraturan tersebut tidak melarang buah-buahan masuk ke Indonesia dari negara manapun, dengan syarat bebas dari lalat buah yang jenisnya belum ada di Indonesia yang memiliki potensi daya rusak tinggi terhadap buah-buahan Indonesia.

2 Untuk menjamin hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan cara:

1) Melaksanakan program Pest Free Area yang mengacu pada "International Standard Rhytosanitary Measures" (ISPM) #26 yaitu Establishment of Pest Free Area for Fruit Flies (*Tephritidae*).

2) Perlakuan terhadap produk buah-buahan dengan cara pemanasan (Vapour Heat Treatment), Pendinginan (Cool Treatment) dan Fumigasi, bila tidak ada program Pest Free Area.

3) Lalat buah yang major pest di AS dan tidak ada di Indonesia baik yang Indegeneus maupun non indegeneus telah di sampaikan Indonesia ke pihak APHIS (Karantina Amerika Serikat). Lalat Buah non indegeneus adalah Medfly yang menyerang buah-buahan terutama Anggur. Sedangkan lalat buah indegeneus antara lain Applemaggot yang menyerang buah-buahan terutama Apel. Applemaggot merupakan major pest yang tersebar di seluruh Amerika Serikat.

3 Mediterranean fruit flies (Med Fly) pada Anggur

a. Indonesia menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan AS dengan mengirim tim ahli guna melakukan *on-site inspection* ke beberapa sentra produksi anggur di AS, dengan persyaratan AS secara terbuka menyediakan data-data ilmiah yang diperlukan oleh tim inspeksi dimaksud.

b. Indonesia telah mengirimkan tim ahli dari Badan Karantina Pertanian bulan Nopember 2006, untuk melakukan *on-site inspection* ke beberapa sentra produksi anggur di negara bagian California yang meliputi Fresno, Madera, Kings, Tulare, Kern, Riverside dan Los Angeles. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka verifikasi terhadap "*mediterranean fruit fly free area*" di California dengan melakukan observasi terhadap pelaksanaan program *surveillan* yang dilakukan oleh USDA, serta mengumpulkan data sebagai bahan penilaian California sebagai *med fly free area* oleh Badan Karantina Pertanian. Hasil penilaian tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk pengakuan California sebagai *med fly free area*. Berdasarkan hasil verifikasi berpedomankan pada ISPM#26 tentang "*Establishment of pest free areas for fruitflies (Tephritidae)*", maka "*med fly free area*" di California telah memenuhi semua kriteria *pest free area* untuk *fruit flies*. Dan standard suhu penyimpanan -1 hingga 0° Celcius akan dapat mempertahankan kualitas buah anggur tetap baik ketika tiba di Indonesia.





4) Applemaggot

Lalat buah yang menyerang buah-buahan terutama apel, dan hama ini belum terdapat di Indonesia. Bila applemaggot masuk ke Indonesia maka akan merusak bukan hanya menghancurkan sentra produksi apel di Indonesia tapi juga akan menyerang buah-buahan lainnya yang dapat menjadi komoditas ekspor buah Indonesia.

Dari publikasi dan laporan yang diterima Indonesia termasuk program "applemaggot survey" yang dilakukan oleh Washington State Department of Agriculture, dan berdasarkan laporan tersebut ternyata Amerika Serikat belum berhasil membangun "pest free area" sesuai dengan ISPM#26 "Establishment of pest free areas for fruitflies (*Tephritidae*)", dari data yang didapat masih ditemukan hama lalat buah tersebut di daerah program bebas hama tersebut.

Dengan demikian Indonesia menyimpulkan bahwa; Buah-buahan yang menjadi media pembawa applemaggot terutama apel dapat masuk ke wilayah Indonesia apabila terlebih dahulu mendapat perlakuan pemanasan (Vapour Heat Treatment), Pendinginan (Cool Treatment) dan Fumigasi.

Delegasi Indonesia juga menyampaikan kepada Amerika bahwa applemaggot dapat berkembang biak di Indonesia karena sentra produksi Appel umumnya berada pada dataran tinggi yang bersuhu dingin dan Indonesia juga menyampaikan kepada Amerika untuk membantu Indonesia dalam rangka kerjasama teknis dan juga meminta contoh bentuk form Phytosanitari Sertifikat yang disanggupi oleh delegasi Amerika.

**Perhatian Amerika Serikat,
kebijakan Impor Hewan dan Produk Daging,
dan meminta klarifikasi dan justifikasi
peraturan menteri nomor 64/2006.**

Dalam rangka mempertahankan status Indonesia sebagai negara bebas penyakit hewan menular dan penyakit hewan karantina, serta untuk melindungi konsumen dalam negeri dari penyakit zoonosis, Menteri Pertanian mengeluarkan peraturan No.64/2006 tentang pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging dan jeroan dari luar negeri. Peraturan tersebut telah dinotifikasi ke WTO sekretariat pada tanggal 28 Agustus 2006 dengan notifikasi no.G/SPS/N/IDN/30. Peraturan tersebut antara lain mengatur persyaratan pemasukan karkas, daging, jeroan dari luar negeri, yaitu bahwa setiap negara eksportir karkas, daging, dan jeroan ke Indonesia harus bebas dari hama penyakit hewan karantina seperti; Foot and Mouth Disease (FMD); Rinderpest; Rift Valley Fever, Contagious Bovine Pleuro-pneumonia (CBPP); dan Bovine Spongiform Encephalopathy / BSE (negligible BSE Risk).

Untuk pencegahan masuknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Indonesia mempersyaratkan bahwa negara-negara yang *eligible* untuk mengekspor produknya adalah negara yang telah ditetapkan oleh OIE sebagai negara bebas PMK. Sedangkan berkaitan dengan BSE (*mad cow*), Indonesia menyampaikan akan mengikuti prinsip-prinsip regionalisasi. (SS/es)



(bersambung pada edisi depan...)

Pelatihan Langaskara di Rindam Jaya : Penguatan dan Pengembangan SDM Barantan

Jakarta - Februari 2007, Bertempat di Rindam Jaya, Kawasan Condet Jakarta, Kepala Badan Karantina, Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA membuka secara resmi pelatihan Pengenalan Tugas Karantina bagi CPNS Badan Karantina Pertanian periode tahun 2007.

Sebagai unit Eselon 1 Departemen Pertanian, Badan Karantina Pertanian mendapat amanat untuk melaksanakan UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Karantina didalam wilayah Negara RI, yang diamanahkan bahwa berbagai sumber daya alam hewani dan hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, sosial dan budaya.

Era globalisasi yang terjadi pada dekade sekarang ini peranan Badan Karantina Pertanian bertambah strategis tidak hanya dalam pencegahan HPHK/OPTK dari luar negeri tetapi peranan Karantina Pertanian dalam perdagangan bebas sangat besar khususnya dalam ketentuan Sanitary dan Phytosanitary (SPS) yang pada dasarnya berisi pengakuan mengenai hak setiap Negara untuk menerapkan ketentuan terkait didasarkan pada alasan-alasan ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, menurut Kepala Badan Karantina Pertanian dihadapan para instruktur Rindam Jaya dan peserta Langaskara, Badan Karantina Pertanian menetapkan visinya yakni : Menjadikan Institusi Karantina Pertanian yang modern dan terpercaya pada tahun'2009.

Modern : mengandung semangat bahwa penyelenggaraan Karantina Pertanian dibangun dan dilaksanakan dengan sistem dan metode yang responsif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.

Terpercaya : mengandung semangat bahwa Karantina Pertanian dilaksanakan dengan azas legalitas nasional maupun internasional didasarkan dengan kaidah-kaidah ilmiah dan transparan.

Untuk itu dalam upaya mewujudkannya disamping organisasi yang dinamis diperlukan persyaratan SDM yang professional.



Program penguatan dan pengembangan SDM Karantina Pertanian tersebut tersusun dalam "Blue Print" pengelolaan SDM lingkup Barantan demi terwujudnya SDM lingkup Barantan yang professional, responsive terhadap perubahan dan konsisten pada komitmennya dalam mewujudkan karantina yang modern dan terpercaya pada tahun 2009 dan Barantan sebagai *leading sektor* pada jajaran Departemen Pertanian.

Kedepan, diinginkan wujud SDM Karantina Pertanian yang ideal antara lain :

- a. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang HPHK/OPTK, Peraturan Perundangan Karantina dan Sistem Manajemen Perkarantinaan
- b. Mampu bekerja dalam situasi yang keras, sepi, banyak tekanan, intrik dan godaan. Mampu bertindak tegas, konsisten, disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai pelaksana peraturan perundangan,
- c. Mampu bekerja secara efektif, efisien, kreatif, ramah, komunikatif dan aspiratif karena bertindak sebagai pelayanan masyarakat
- d. Mempunyai moral yang baik, amanah, transparan dan bebas KKN
- e. Mempunyai fisik dan mental yang kuat untuk dapat bekerja lebih dari waktu yang biasa dilakukan oleh instansi lain.

Pada akhir sambutannya, Kepala Badan menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama Resimen Induk Kodam Jaya dalam melatih dan mengembleng CPNS Barantan dengan harapan pembentukan CPNS Barantan dengan fisik dan mental yang kuat dapat terwujud, semoga Allah SWT meridhoi usaha ini dan Selamat Berlatih...(BK/es)

Menikah

Pada tanggal 4 Maret 2007 telah dilangsungkan pernikahan antara Muhayar, SH (staf kepegawaian Barantan) dengan Wiwit Rahmatika A Md.Kep, selamat menempuh hidup baru dan semoga bahagia.

Purna Bhakti

Diawal tahun 2007, warga Barantan yang memasuki masa purna bhakti adalah : Bapak Edy Praminto (Kepala Bidang Informasi Perkarantinaan), Bapak Abdul Manaf (Staf Kepegawaian) dan Drh. Margaretha, M.Phil (fungsional Karantina Hewan).

Barantan Peduli Banjir

Musibah banjir yang melanda ibukota di media Februari 2007 telah mengetuk hati keluarga Barantan untuk peduli terhadap rekan-rekan yang tertimpa musibah.

Namun bantuan berupa 1 paket sembako yang diperuntukan bagi karyawan/karyawati lingkup Barantan dan UPT yang terkena banjir tidak saja diberikan oleh KOPRI, hal yang sama juga dilakukan ibu-ibu Dharma Wanita Sub Unit Barantan dalam kegiatan Peduli Banjir ini.

Tips

Memasuki tahun anggaran baru, dapat dipastikan jadwal kegiatan yang sudah siap menanti Anda. Terkadang kegiatan Anda tidak saja di dalam kantor tapi terkadang mengharuskan untuk dinas luar.

Anda frustrasi dalam mengatur koper Anda yang tidak muat menampung seluruh barang bawaan selama dinas luar? Berikut tips Menata Koper Praktis untuk Anda, semoga bermanfaat dan *bon voyage* !

- Letakkan semua diatas tempat tidur dan pisahkan menjadi kelompok-kelompok.
- Susunlah barang-barang yang tidak gampang kusut, seperti pakaian dalam dan T-Shirt, dibagian bawah koper agar berfungsi sebagai bantalan. Baru diatasnya diletakkan pakaian yang mudah kusut, seperti baju terusan dan blazer, dalam keadaan terlipat dua.
- Gulunglah pantolan agar tida kusut dan susun dibagian tepi koper.
- Satukan peralatan mandi dalam kantung plastic untuk mencegah kebocoran.

- Letakkan sepatu didekat engsel koper dengan posisi tumit sol sepatu kiri menempel pada ujung depan sol sepatu kanan. Isi bagian dalam sepatu dengan kaos kaki.
- Hindari menyimpan benda-benda berharga, obat-obatan, kunci atau dokumen perjalanan didalam koper. Sebaiknya simpan semua itu dalam tas terpisah yang selalu Anda bawa kemana-mana



Sudah merupakan suatu hal yang wajar kalau setiap naskah yang dimuat buletin ini terlebih dahulu mengalami proses perubahan yang memakan waktu. Untuk lancarnya penyiapan naskah dimaksud dan mengurangi kesalahan redaksional, kepada penyumbang naskah dimohon agar memperhatikan dengan cermat pedoman yang diuraikan di bawah ini. Buletin ini merupakan wadah Pejabat Fungsional, pejabat teknis dan karyawan/wati di lingkup Badan Karantina Pertanian untuk menyalurkan Karya Tulisnya. Diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat menjadi petunjuk kepada Pejabat Fungsional di lingkup Badan Karantina Pertanian agar dapat mengembangkan profesinya dan menyalurkan bakat menulisnya.

Ruang Lingkup

Buletin Media Quaranta memuat Karya Tulis/Ilmiah/ Makalah berupa tinjauan ilmiah atau ulasan ilmiah dibidang Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengendali HPI, Pengendali OPT tentang hasil penelitian/pengkajian/survey/evaluasi, yang disajikan secara praktis atau ilmiah populer. Buletin ini diterbitkan 2 bulan/ sekali.

Bahasa

Buletin ini menggunakan tulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemakaian istilah yang baru supaya mengikuti pedoman ejaan yang disempurnakan yang berlaku dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Bentuk Naskah

Naskah wajib diketik di atas kertas kwarto putih pada satu permukaan saja, memakai dua spasi. Pinggir kiri dan kanan tulisan disediakan ruang kosong minimal 3,5 cm dari pinggir kertas. Panjang naskah 3 - 5 halaman termasuk tabel, gambar, dan daftar bacaan. Naskah disusun dalam urutan sebagai berikut judul tulisan; nama penulis dan alamatnya; pendahuluan; isi tulisan; penutup serta Daftar Pustaka.

Judul

Judul terdiri dari suatu ungkapan yang dengan tepat mencerminkan isi tulisan. Nama serta instansi tempat kerja penulis dengan alamat yang jelas harus dicantumkan di bawah judul. Bila penulis lebih dari seorang, maka penulisan namanya secara berurutan sesuai dengan kode etik penulisan. Kalau dirasa perlu, judul tulisan masih dapat dilengkapi oleh sub judul untuk mempertegas maksud tulisan.

Teks

Teks terdiri dari pendahuluan, isi karangan, penutup serta daftar bacaan. Satuan ukuran didalam teks dan grafik memakai sistem metrik misalnya dalam satu mikron, mm, cm, km, untuk panjang serta cm³ dan liter untuk volume, hindari memakai satuan pikul, kwintal dan lain sebagainya.

Tabel

Tabel hendaknya diberi judul yang singkat tetapi jelas dengan catatan secukupnya termasuk sumbernya. Tabel diberi nomor urut dengan angka arab.

Gambar dan Grafik

Gambar dan grafik dibuat dengan garis cukup tebal sehingga memungkinkan pencetakan dalam proses mencetak. Keterangan grafik dan gambar janganlah ditulis pada grafik dan gambar itu, melainkan pada selembar kertas sendiri dengan dua spasi. Nama penulis serta nomor gambar harus ditulis dibalik gambar itu disertai sumbernya dengan tulisan pensil lunak. Seperti halnya pada tabel, keterangan yang dimuat pada grafik harus mencukupi agar dapat disajikan secara mandiri.

Potret

Potret adalah satu dari bentuk gambar, karena itu hendaknya dipilih yang mempunyai kontras yang baik dan diberi keterangan gambar.

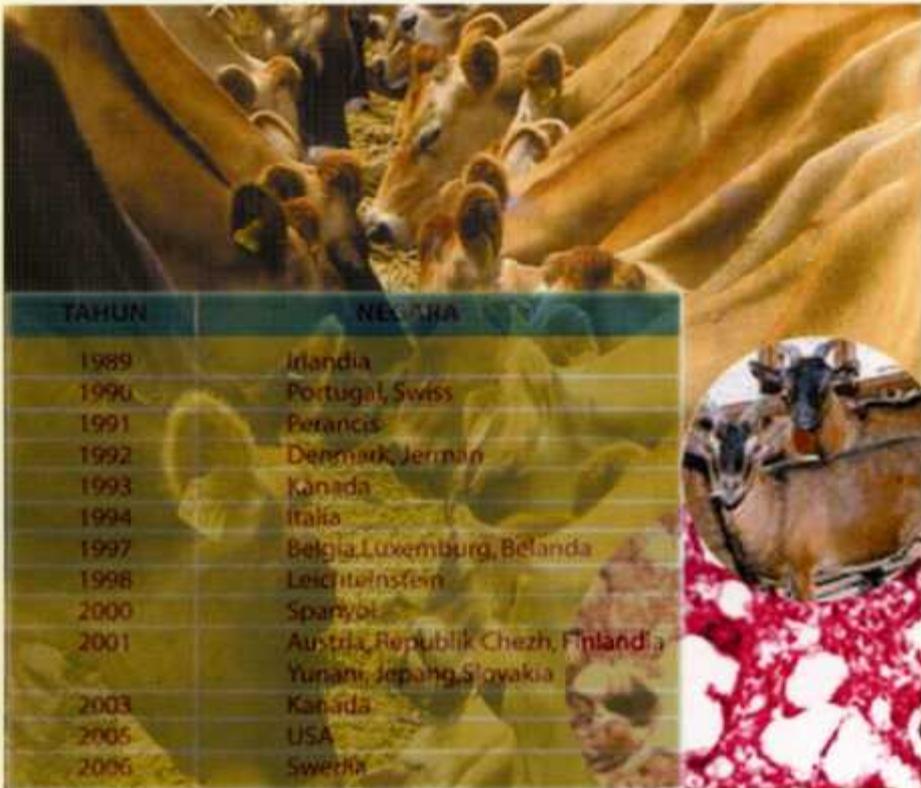
Surat Menyurat

Naskah dikirim rangkap dua, dialamatkan kepada: Pemimpin Redaksi Buletin Media Quaranta

CEGAH PENYAKIT SAPI GILA

Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)

Cegah penyakit Sapi Gila masuk ke Indonesia !
Penyakit Sapi Gila dapat menular ke manusia
Sampai saat ini belum ditemukan obat yang dapat
mengendalikan atau menyembuhkan Penyakit
Sapi Gila



TAHUN	NESTOR
1989	Irlandia
1990	Portugal, Swiss
1991	Perancis
1992	Denmark, Jerman
1993	Kanada
1994	Italia
1997	Belgia, Luxemburg, Belanda
1998	Leichtenstein
2000	Spanyol
2001	Austria, Republik Chezh, Finlandia, Yunani, Jepang, Slovakia
2003	Kanada
2005	USA
2006	Swedia

*Untuk informasi dan keterangan
lebih lanjut hubungi :
Balai Besar/ Balai/Stasiun
Karantina Hewan terdekat
atau kunjungi website kami
www.karantina.deptan.go.id*

Badan Karantina Pertanian
Gedung E, DEPARTEMEN PERTANIAN
Jl. Harsono RM No 3 - Jakarta 12550
Tel : 021 - 78842042 Fax : 021 - 7816481
E-mail : caqsps@indo.net.id